

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014-2018 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh
SAWIYAN KHALID
NPM : 1551010290

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014-2018 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh :
SAWIYAN KHALID
NPM. 1551010290

Program Studi: Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev.
Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Berlakuknya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian PBB yang sebelumnya termasuk Pajak Pusat kini berubah menjadi Pajak Daerah. Efektivitas menurut Mardiasmo ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Mardiasmo kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak dapat berkontribusi dalam penerimaan PAD. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung? Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung? Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penerimaan PBB terhadap PAD di Kota Bandar Lampung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas PBB, untuk mengetahui kontribusi PBB terhadap PAD, untuk mengetahui pemungutan PBB terhadap PAD ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari BPRRD dan data skunder yang bersumber dari literature, jurnal penelitian dan artikel-artikel terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisis data dihitung menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi dengan sampel dari tahun 2014-2018.

Hasil penelitian adalah : Pajak Bumi dan Bangunan memiliki realisasi yang bersifat fluktuatif dan belum ada yang mencapai target, dengan kriteria efektivitas yakni tidak efektif yang mana tingkat efektivitas setiap tahunnya juga mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2014 sebesar 55,06%, 2015 sebesar 32,11%, 2016 sebesar 53,06%, 2017 sebesar 51,89% dan tahun 2018 sebesar 48,23%. Sedangkan untuk kontribusi yang diberikan PBB terhadap PAD memiliki kriteria kurang berkontribusi, dimana pada tahun 2014 sebesar 12,08%, 2015 sebesar 12,20%, 2016 sebesar 16,42%, 2017 sebesar 13,34%, dan tahun 2018 sebesar 14,21%. Kurangnya kontribusi yang diberikan oleh PBB dikarenakan realisasi penerimaan PBB yang meningkat namun tidak begitu signifikan, namun sebaliknya realisasi penerimaan PAD mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk dapat meningkatkan efektivitas dan kontribusi PBB, pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan beberapa upaya yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melaksanakan program pembangunan, dan melakukan suatu penyederhanaan pelayanan. Dalam tinjauan Ekonomi Islam pajak bumi dan bangunan diperbolehkan menurut para ulama apabila dipungut dengan keadilan. Tidak memberatkan rakyat saat membayar dan memiliki kemaslahatan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, PBB, PAD



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014-2018 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)**

Nama : Sawiyan Khalid
NPM : 1551010290
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev
NIP. 197809182005012005

Pembimbing II

Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy
NIP. 198605172015031005

Mengetahui
Ketua Jurusan

Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014-2018 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi DAerah) disusun oleh Sawiyan Khalid, NPM: 1551010290, Program Studi Ekonomi Syari'ah, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2019

TIM MUNAQOSYAH

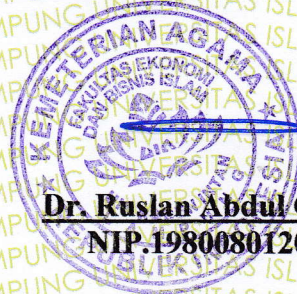
Ketua : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. (.....)

Sekretaris : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.Si. (.....)

Penguji I : Nurlaili, M.A. (.....)

Penguji II : M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

NIP.198008012003121001

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”

(QS. Al-Mulk (67): 15)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yaitu, Bapak Catur Yantoro dan Ibu Rodiyah, dan adikku yaitu, Moellyani yang telah memberikan doa, dukungan dan nasehat yang selalu menyertai penulis. Semoga kelak penulis menjadi anak yang dapat menjadi suri tauladan dan menjadi pribadi yang sholihah, sukses dunia dan akhirat.

Seluruh Dosen UIN (Universitas Negeri Islam) Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama kegiatan perkuliahan dan memberikan motivasi bagi penulis, semoga penulis dapat meneruskan jenjang beliau menjadi dosen yang berbudi pekerti tinggi dan berpengetahuan luas.

Terkhusus almamaterku UIN (Universitas Islam Negeri) Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka dunia kehidupan.

Bandar Lampung, 18 November 2019
Penulis

Sawiyah Khalid
NPM. 1551010290

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sawiyan Khalid, nama panggilan Iyan, lahir pada tanggal 15 Oktober 1997, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Catur Yantoro dan Ibu Rodiyah.

Riwayat pendidikan penulis:

1. SDN 2 Segala Mider lulus pada tahun 2009
2. SMPN 7 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012
3. MAN 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015
4. Terdaftar sebagai Mahasiswi di UIN Raden Intan Lampung, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2015.

Bandar Lampung, 18 November 2019
Penulis

Sawiyan Khalid
NPM. 1551010290

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014-2018 (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada sahabat, tabi’in, serta pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Atas terselesaikannya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapat Ridho dan Karunia Nya.
2. Bapak Prof. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

5. Ibu Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev. dan Bapak Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy. selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami.
7. Kepada sahabat saya Abdurahman Muas Algifari, Andre Febriantoni, dan Ahmad Sandika yang selalu member dukungannya.
8. Kepada seluruh keluarga besar Ekonomi Islam A 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tetap pada lindungan Allah SWT.

Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu, dan saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan mendapat ridho Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya

Bandar Lampung, 15 November 2019
Penulis

Sawivan Khalid
NPM. 1551010290

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERETUJUAN BIMBINGAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	15
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak	18
1. Pengertian Pajak	18
2. Fungsi Pajak	19
3. Syarat Pemungutan Pajak	21
4. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	23
5. Jenis-Jenis Pajak.....	24
6. Tata Cara Pemungutan Pajak	26
B. Pendapatan Asli Daerah.....	27

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	27
2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah	28
3. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	28
a. Pajak Daerah.....	29
b. Retribusi Daerah.....	31
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	32
d. Pendapatan Lain-lain Yang Sah	32
4. Pendapatan Asli Daerah Dalam Ekonomi Islam.....	32
C. Pajak Bumi dan Bangunan.....	36
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	36
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	37
3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	38
4. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	40
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	43
6. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan.....	44
7. Kepatuhan Wajib Pajak	44
D. Efektivitas	45
1. Pengertian Efektivitas.....	45
2. Model-model Efektivitas	47
3. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas	48
4. Indikator Efektivitas	51
E. Kontribusi	54
1. Pengertian Kontribusi	54
2. Perhitungan Kontribusi	55
F. Pajak Dalam Pandangan Ekonomi Islam.....	56
1. Pengertian Pajak Dalam Ekonomi Islam	56
2. Landasan Teori Pajak Menurut Syariat	57
3. Ulama yang Berpendapat Bahwa Pajak itu Boleh.....	59
4. Karakteristik Pajak Dalam Ekonomi Islam.....	60

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Sejarah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	62
2. Tugas Pokok BPPRD.....	62
3. Susunan Organisasi BPPRD	64
4. Visi, Misi, Tujuan Sasaran serta Kebijakan.....	65
B. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	67
1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB dan PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018	67
2. Efektivitas PBB dan PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018	69
3. Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018	70
C. Hasil Penelitian	71

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Efektivitas PBB Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	78
B. Analisis Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	86
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi PAD Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung (ribu rupiah) Tahun 2014-2018	6
Tabel 1.2 Target dan Realisasi PBB Kota Bandar Lampung	9
Tabel 1.3 Klasifikasi Kriteria Efektivitas	14
Tabel 1.4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	15
Tabel 3.1 Tingkat Pertumbuhan PAD Kota Bandar Lampung	68
Tabel 3.2 Tingkat Pertumbuhan PBB Kota Bandar Lampung	68
Tabel 3.3 Efektivitas PBB Kota Bandar Lampung.....	69
Tabel 3.4 Efektivitas PAD Kota Bandar Lampung	70
Tabel 3.5 Kontribusi PBB Terhadap PAD Kota Bandar Lampung.....	71
Tabel 4.1 Tingkat Pertumbuhan PAD Kota Bandar Lampung	76
Tabel 4.2 Tingkat Pertumbuhan PBB Kota Bandar Lampung	77
Tabel 4.3 Efektivitas PBB Kota Bandar Lampung.....	79
Tabel 4.4 Efektivitas PAD Kota Bandar Lampung	83
Tabel 4.5 Kontribusi PBB Terhadap PAD Kota Bandar Lampung.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi
2. Wawancara
3. Surat Riset
4. Surat Izin Penelitian/Survei
5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2014
6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2015
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2016
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2017
9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹

2. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.²

¹ Nugroho Eko, 2002, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 65

3. Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi dalam PBB adalah suatu nilai untuk mengetahui tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan PBB dengan realisasi PAD.³

4. Pajak Bumi Bangunan

Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan bangunan tersebut.⁴

5. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk membahas lebih dalam mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

² Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, "Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014", Jurnal Akuntansi, Volume 3 No. 2 (Desember 2015), hlm. 5

³ Felia Lintong, dkk, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Manado", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (4), 2018.

⁴ Galih Wicaksono, Tree Setiawan, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember", Jurnal STIE Semarang Vol. 9 No. 1 (Februari 2017)

⁵ Nur Riza Utairahman dkk, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tumohon", Vol. 16 No. 02 (2016)

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah :

1. Secara Objektif

Pajak Bumi Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar, tetapi itu semua tidak sesuai dengan kenyataan yang ada karena hasil pendapatan pajak bumi bangunan setiap tahunnya tidak ada satupun mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Secara Subjektif

Sumber literatur terkait judul penelitian ini telah tersedia di Badan Pusat Statistik dan Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Pokok bahasan dalam judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis, yaitu Ekonomi Islam konsentrasi Ekonomi Pembangunan.

C. Latar Belakang Masalah

Donasi pajak di Indonesia sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya Republik ini. Bersumber pada data APBN dari tahun ke tahun yang secara rutin dipublikasikan oleh Departemen keuangan.⁶ Dengan meningkatnya penerimaan disektor perpajakan, diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menengadahkan tangan kepada Negara lain.

Pajak mempunyai peranan yang penting dalam membiayai keperluan negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintah daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan

⁶ Herry Purwono, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm 4

pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga itu sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa bijaksana terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak – hak rakyat, dengan kata lain pemerintah harus adil dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh masyarakat.⁷ Selain itu pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang sudah direncanakan dan juga menunjang keperluan pemerintah itu sendiri.

Pemungutan Pajak juga diatur dalam Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At- Taubah ayat 29 :

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.⁸

Tafsir pada ayat diatas adalah *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dulu memerangimu, mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus*

⁷ Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst Putu Wirawati, “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali”, (E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana, S.3, 2013:574-585).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 2005, hlm.152

melakukan *apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya* dan mereka yang *tidak beragama dengan agama yang benar*, yakni agama Islam, sementara di sisi lain mereka telah mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukminin. Padahal, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan Kitab yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka *hingga* sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau *membayar jizyah*, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan, *dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah di mana mereka tinggal.

Sesuai teori pajak daerah, teori *Development from below* bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dari pada pemerintah pusat karena mereka dapat melihat secara langsung manfaat serta pembangunan di daerahnya. Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat.⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah yang berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.¹⁰

⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang : UB Press, September 2017) hlm 45

¹⁰ Raudhatun Wardani, Wida Fadhila, “*Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 2, No. 3, (2017) hlm. 10-17

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
(ribu rupiah) Tahun 2014-2018

Kabupaten Kota	Realisasi Pendapatan Asli Daerah				
	2014	2015	2016	2017	2018
Lampung Barat	40.800.358	46.434.649	49.078.912	82.125.265	45.153.982
Tanggamus	22.488.697	21.979.172	23.712.889	56.177.614	83.874.907
Lampung Selatan	130.597.526	161.645.901	184.063.778	206.061.231	218.376.243
Lampung Timur	83.131.971	84.496.936	94.924.247	207.235.265	236.726.568
Lampung Tengah	108.180.987	116.343.189	137.871.550	289.902.140	153.971.205
Lampung Utara	80.918.349	93.239.503	96.607.164	103.970.703	133.231.503
Way Kanan	45.811.422	47.882.003	44.346.945	49.551.273	52.566.751
Tulang Bawang	24.444.892	34.088.549	26.416.719	40.931.504	103.010.559
Pesawaran	36.482.436	37.060.018	41.956.848	98.529.483	59.844.283
Peringsewu	63.339.740	61.765.136	68.157.777	117.629.411	82.534.500
Mesuji	20.901.990	18.713.301	27.783.046	22.114.017	41.025.735
Tulang Bawang Barat	15.436.104	16.452.748	20.882.974	97.387.115	31.210.500
Bandar Lampung	387.175.943	394.899.945	484.863.969	622.223.601	551.721.101
Metro	97.307.834	127.586.002	113.983.941	154.652.517	136.386.373
Pesisir Barat	10.373.342	11.597.895	20.710.862	42.895.147	27.998.961

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung mencapai pendapatan tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Realisasi penerimaan PAD di Kota Bandar Lampung selama tahun 2014-2017 selalu mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2018 realisasi penerimaan PAD mengalami sebuah penurunan. Dengan adanya suatu penurunan penerimaan PAD seharusnya pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada agar PAD selalu meningkat dan mencapai target yang sudah ditetapkan, dan semua program-program yang direncanakan berjalan sesuai dengan baik dan tepat sasaran.

Terdapat 2 (dua) jenis dalam pajak daerah Kabupaten/Kota yang merupakan pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).¹¹

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat kini menjadi Pajak Daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹²

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain menjadi pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota Bandar Lampung juga menjadi pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung.¹³ Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015, diputuskan bahwa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung melimpahkan sebagian kewenangan dalam pemungutan PBB kepada Camat dan Lurah se- Kota Bandar Lampung.¹⁴

¹¹ Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 133.

¹² Ferian Dana Pradita, dkk, *"Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB_P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya"*, PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2019*

¹⁴ Perda Nomor 9 Tahun 2015

Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Kota Bandar Lampung sampai akhir bulan Oktober 2018 baru mencapai 54 persen dari total target yang telah ditetapkan. Namun kepala BPPRD Kota Bandar Lampung, Yanwardi, menjelaskan bahwa pendapatan PBB sampai akhir tahun target dapat mencapai sebesar 70 persen. “Untuk PBB akhir tahun ini sudah mulai bergerak, sampai akhir tahun ini target bisa mencapai 70 persen, mudah-mudahan bisa tercapai target sampai akhir tahun ini” jelas Yanwardi.¹⁵

Selanjutnya, BPPRD Kota Bandar Lampung mendata sampai tanggal 22 Oktober 2018 tunggakan Pajak Bumi Bangunan total sebesar 9,4 Miliar. Data ini merupakan tahun pajak mulai dari 2014-2017. Hal itu dijelaskan oleh Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung. “Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan, untuk jumlah tunggakan PBB Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan diatas Rp. 25 Juta, dan tahun pajak 2014-2017, total seharusnya 9,4 Miliar.”¹⁶

Dilihat dari pernyataan Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung diatas, seharusnya PBB perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah dalam pemungutannya. Mengingat target yang telah ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selalu naik setiap tahunnya, tetapi tidak dibarengi dengan realisasi penerimaan yang tidak mencapai target. Berikut adalah jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung :

¹⁵ <http://www.lampost.co/berita-realisisi-pbb-kota-baru-54-persen.html>, (1 Agustus 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁶ <http://www.lampost.co/berita-wow-tunnggakan-pbb-kota-bandar-lampung-mencapai-rp-9-4-miliar.html>, (1 Agustus 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan
Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi
2014	85.000.000.000	46.804.938.319
2015	150.000.000.000	48.170.457.140
2016	150.000.000.000	79.589.369.174
2017	160.000.000.000	83.029.846.318
2018	165.000.000.000	79.586.139.515

Sumber : *Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD)* Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 1.2, dapat diketahui bahwa data laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama tahun 2014-2018 tidak ada yang mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2017 merupakan realisasi penerimaan PBB terbesar dari lima tahun terakhir, namun besarnya pendapatan tidak sampai dengan total target yang sudah ditetapkan. Sedangkan tahun 2014, menjadi tahun dengan pendapatan PBB paling rendah diantara yang lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hal yang unik untuk diteliti karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berguna untuk menyelenggarakan dan membangun daerah serta menjalankan otonomi daerah. Maka dari itu, perlu dianalisis bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan suatu penelitian yang berjudul : **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- b. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Untuk mengetahui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut perspektif Ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Selain itu diharapkan menjadi sebuah informasi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan memperoleh hasil yang maksimal.

b. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan kinerjanya agar Pendapatan Asli Daerah dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan terutama dari pendapatan Pajak Bumi Bangunan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang digunakan dalam kancan yang sebenarnya.¹⁷ Adapun sifat penelitian adalah metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menganalisis data, serta mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.¹⁸ Dalam hal ini peneliti memperoleh data-data atau informasi secara langsung dengan wawancara terhadap Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, (Bandung : CV Alfabeta, Cetakan ke-23, 2016) hlm.9.

¹⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Ed.1), Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 79

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti sumber bacaan yang ada seperti literatur, buku-buku, jurnal penelitian ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan objek dan judul penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan data selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan atau diagnosis.²⁰

Tempat observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kantor Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah

¹⁹ Nur Indrianto, Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : bpfe, 2009), hlm 146

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, hlm. 145

ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.²¹

Dalam proses ini peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur dan bersifat pertanyaan bebas yang berkaitan dengan masalah penelitian ini sehingga hanya menjadi penguat dari hasil penelitian yang dilakukan, narasumber saat wawancara yaitu dengan staff bidang pajak dan non pajak pada Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga memperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.²²

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Kemudian data dihitung menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi.

a. Efektivitas Penerimaan PBB

Efektivitas menunjukkan bahwa sampai seberapa besar tercapainya suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar tingkat efektivitasnya. Sebaliknya, semakin kecil hasil yang dicapai maka semakin kecil pula efektivitasnya.

²¹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, hlm. 80

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Ed. 2*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), hlm. 124

Perbandingan efektivitas PBB yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan dan target PBB, rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas adalah²³ :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Setelah menghitung efektivitas kita dapat mengukur persentase kriteria, jika melebihi 100% maka Pajak Bumi Bangunan sangat efektif. Selanjutnya efektivitas dari temuan secara langsung dilaporkan, dan dilakukan wawancara kepada instansi terkait sebagai tambahan informasi.

Tabel 1.3
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Kriteria	Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	<60

Sumber : Depdagri, Kemendagri, No. 690.900.327 Tahun 1996

b. Kontribusi

Kontribusi merupakan sumbangan PBB terhadap PAD dengan rumus sebagai berikut²⁴ :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{PBB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

²³ Raudhatun Wardani, Wida Fadhila, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 2, No. 3, (2017) hlm. 10-17

²⁴ Ibid.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak bumi bangunan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Kriteria	Persentase
Sangat Kurang	0,00%-10%
Kurang	10,10%-20%
Sedang	20,10%-30%
Cukup Baik	30,10%-40%
Baik	40,10%-50%
Sangat Baik	>50%

Sumber : Depdagri, Kemendagri, No. 690.900.327 Tahun 1996

G. Penelitian Terdahulu

primer, didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada pihak Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan sebagai acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian yang terdahulu mengenai kontribusi pajak bumi dan bangunan. Hal ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian :

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Riza Utiahman, Een N. Walewangko, Hanly F. Dj. Siwu (2016) dengan judul “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dan data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data terkait dan data sekunder. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung menurun²⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Galih Wicaksono dan Tree Setiawan Pamungkas (2017) dengan judul “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember*”. Tujuan dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas PBB dan untuk mengetahui tingkat kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB pada tahun 2013 berada dalam kategori yang cukup efektif yaitu sebesar 88,57%. Pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 71,05% dan 66,02% dengan kategori kurang efektif ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB setiap tahunnya menurun karena target penerimaan PBB tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan PBB. Sedangkan untuk kontribusi PBB dari tahun 2013-2015 sebesar 8,33%, 8,04% dan 7,14% dengan kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi PBB semakin menurun setiap tahunnya karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya dan tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan PBB yang masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya²⁶.

²⁵ Nur Riza Utiahman dkk, “*Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*”, Volume 16 No.02 (2016)

²⁶ Galih Wicaksono, Tree Setiawan, “*Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember*”, Jurnal STIE Semarang Vol 9 No.1 (Februari 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatun Wardani, Wida Fadhila (2017) dengan judul “*Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar*”. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas penerimaan PBB setiap tahun meningkat namun pemerintah belum berhasil dalam mengelola PBB dikarenakan peningkatan penerimaan PBB tidak diikuti dengan meningkatnya penetapan target. Kontribusi PBB dikategorikan sangat kurang dimana rata-rata presentase hanya 2,08%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang²⁷.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah obyek yang digunakan penulis bertempat di Kota Bandar Lampung, perbedaan selanjutnya adalah penulis ingin mencari tahu bagaimana pandangan ekonomi islam dalam membahas mengenai efektivitas dan kontribusi pajak bumi bangunan di Kota Bandar Lampung.

²⁷ Raudhatun Wardani, Wida Fadhila, “*Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 2, No. 3 (2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi Pajak ada berbagai macam dari para ahli atau pemerhati pajak yang menyebutkan atau menyajikan definisi pajak tersebut sesuai dengan kemampuan pemahaman dan pemikiran mereka. Berikut adalah definisi pajak menurut para ahli :

- a. Menurut Adriani pajak merupakan iuran yang diberikan kepada negara yang dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai sebuah pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak merupakan iuran wajib yang berupa uang atau barang dan dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, berguna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- c. Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- d. M. Ray Sommerfeld, menyatakan bahwa pajak ialah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sector swasta kepada sector pemerintah.

Pemindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.²⁸

Dari beberapa definisi pajak yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah atas sebagian harta yang dimiliki, dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai sifat memaksa dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung atas pembayaran pajak yang telah dilakukan.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan, karena pajak adalah sumber pendapatan negara. Ada 2 fungsi pajak, sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai suatu sumber pendapatan negara, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai kebutuhan pengeluaran-pengeluaran negara, untuk bisa menjalankan tugas-tugas rutin negara membutuhkan biaya. Biaya ini bisa didapatkan dari suatu penerimaan pajak. Pajak untuk saat ini digunakan sebagai pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam

²⁸ Darwin, MBP, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 15-16

negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor perpajakan.²⁹

b. Fungsi Mengatur (*Cregulerend*)

Pemerintah dapat mengatur suatu pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya sebagai berikut :

- 1) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang-barang hasil industri tertentu, seperti halnya industri rokok, industri semen, industri baja, dan sebagainya. Dikenakannya pajak untuk industri tersebut agar terdapat penekanan produksi terhadap industri itu, karena dengan pembuatan barang-barang industri tersebut dapat menyebabkan polusi dan mengganggu lingkungan.
- 2) Pajak yang tinggi akan dikenakan pada barang-barang mewah, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat melakukan jual beli terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang, maka semakin tinggi juga pajak yang dikenakan sehingga barang tersebut menjadi mahal harganya. Pengenaan pajak terhadap barang mewah ini, agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk membeli barang mewah dan untuk mengurangi gaya hidup mewah.

²⁹ <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak akan menimbulkan hambatan atau perlawanan dari wajib pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai suatu keadilan, maka undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil menurut perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk bisa mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak serta mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan dengan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak memang harus sesuai dengan peraturan dari perundang-undangan yang berlaku. Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Selain itu pemerintah juga telah membuat UU yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, tentang Bea Cukai, dan lain-lain. Undang-undang tersebut mengatur hal-hal yang lebih spesifik sesuai dengan bahasannya, dan aturan-aturan tersebut akan berlaku jika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia. Dengan ini memberikan sebuah jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak akan menimbulkan pelemahan perekonomian di masyarakat. Contohnya ketika terjadi penurunan pada nilai rupiah, harga dollar yang semakin menguat, investasi yang semakin sepi, penjualan yang semakin menurun karena pembeli malas berbelanja, tetapi pemerintah malah menaikkan tarif pajak. Maka dari itu pemerintah harus memastikan dalam penerapan pajak harus melihat dari segi ekonomis, agar kebijakan-kebijakan pajak tersebut bisa membuat perekonomian Indonesia membaik.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien, sesuai dengan Fungsi *Budgetair*. sumber pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran ini berarti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan agar programnya tetap berjalan sesuai rencana. Misalnya, kebutuhan pendidikan, kesehatan, belanja pegawai dan sebagainya. Dengan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan program, seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak agar efektif dan efisien, sehingga penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan tidak terlalu berbeda jauh.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini sudah terpenuhi oleh perundang-undangan terbaru. Bisa dilihat dari contoh berikut :

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 jenis tarif, kini hanya 2 tarif,
- 2) Tariff PPN yang beragam kini disederhanakan dan menjadi satu tariff saja yaitu sebesar 10%,
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh), yang berlaku untuk badan maupun perseorangan (orang pribadi).

4. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan ataupun memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk melakukan pemungutan pajak. Teori-teori mengenai pajak menurut Mardiasmo, antara lain :

a. Teori Asuransi

Teori Asuransi adalah, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak yang berkaitan dengan rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak terhadap rakyat (wajib pajak) didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang kepada negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus disamakan besarnya, yang artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk dapat mengukur *daya pikul*, dapat digunakan dua pendekatan berikut :

- 1) *Unsur Objektif*, dengan melihat seberapa besar penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai salah satu kewajiban yang harus ditaati.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak dari akibat pemungutan pajak. Maksudnya adalah, memungut pajak berarti menraik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya atau memberikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat harus diutamakan.³⁰

5. Jenis-Jenis Pajak

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibebankan sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

³⁰ *Ibid*, hlm. 4-6

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan kesadaran Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai kepentingan negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan daerah. Pajak daerah terdiri dari :

- a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Pajak Hiburan.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pajak merupakan suatu sistem yang telah diatur oleh undang-undang, salah satunya mengenai pemungutan pajak. Stelsel pajak adalah sistem dalam pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wakib pajak. Pemungutan pajak bisa dilakukan dengan 3 (tiga) stelsel, yaitu sebagai berikut :

1) Stelsel Nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak ini didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kekurangannya, pajak baru bisa dikenakan pada akhir periode.

2) Stelsel Anggaran (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak ini didasarkan pada suatu anggaran yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besaran pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu hingga akhir bulan. Sedangkan untuk kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan percampuran antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan yang kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan tadi, maka dari itu Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, kalau lebih kecil kelebihannya maka dapat diminta kembali.³¹

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani yaitu pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah tersebut yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

³¹ *Ibid*, hlm. 7-9

³² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm.51-52

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan sumber dana untuk sebuah pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan usaha daerah untuk memperkecil atau meminimalkan atas ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.³³

Dari beberapa pendapat diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh daerah, dimana penerimaan tersebut bersumber dari berbagai potensi-potensi yang terdapat di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain yang mana penerimaan tersebut dikelola atau diatur oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tersebut dan diatur oleh Undang-Undang yang berlaku,

2. Dasar Hukum

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini didapatkan sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah.

³³ A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.32

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber dari pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1) Jenis dan Objek Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 macam, yaitu pajak provinsi dan juga pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yaitu sebagai berikut :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air. Objek pajak ini adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
- b) Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.³⁴

³⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, hlm. 53-54

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa penyewaan gedung untuk kegiatan pertemuan di hotel;

b) Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan sebuah pembayaran;

c) Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan sebuah hiburan dengan dipungut biaya;

d) Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua jenis penyelenggaraan atau pemasangan reklame;

e) Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekening pembayarannya dilakukan oleh pemerintah daerah;

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek Pajaknya adalah semua kegiatan pengambilan bahan galian golongan c;

g) Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan atau berkaitan dengan suatu

pokok usaha maupun yang sudah disediakan sebagai suatu usaha, termasuk dalam penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang melakukan pungutan bayaran.³⁵

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah yaitu suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan orang pribadi ataupun suatu badan. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi, hanya beberapa jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa-jasa yang dimaksud tersebut dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, serta Retribusi Perizinan Tertentu.

Penggolongan jenis retribusi tersebut dimaksudkan supaya dalam menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi yang sudah ditetapkan. Penetapan itu juga dimaksudkan supaya terciptanya ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan suatu kepastian kepada masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan³⁶.

³⁵ Darwin, MBP, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 119-128

³⁶ *Ibid*, hlm. 166-167

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba dari lembaga keuangan non-bank, laba dari perusahaan milik daerah lainnya, dan laba dari penyertaan modal atau investasi kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah, adalah kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang mempunyai tujuan menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan di daerah dalam bidang tertentu yang terdiri dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas suatu keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dan pendapatan denda bank.³⁷

4. Pendapatan Asli Daerah Dalam Ekonomi Islam

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan suatu tanggung jawab pemerintah yang mana pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, serta

³⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2017*, hlm. 6

mengoperasikan pelayanan publik untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.³⁸

Pemerintah dalam mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab untuk bisa menciptakan kesejahteraan, pemerintah juga memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam yaitu untuk menciptakan suatu stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan dalam pendapatan, serta tujuan lain yang ada di dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi sehingga terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam juga dikelola untuk membantu serta mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang atau tidak mampu.³⁹

Berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan dalam Islam :

a. *Zakat*

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada pemerintah atau pengurus kaum muslimin (amil), untuk membiayai kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia. Disaat Periode Mekkah, zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi kaum Muslimin akan pentingnya dalam membentuk suatu kehidupan masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan cara membebaskan kemiskinan dan kekafiran. Namun saat Periode Madinah, zakat dipungut

³⁸ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 1.

³⁹ *Ibid*, hlm. 191.

menjadi suatu kewajiban dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan seorang amil zakat atau petugas pemungut zakat.⁴⁰ Seperti firman Allah SWT, dalam QS. An-Nur (24) ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul (Muhammad), supaya kamu diberi rahmat”.⁴¹

b. *Kharaj*

Kharaj merupakan sumber pendapatan pertama kali yang diperkenalkan pada zaman Rasulullah SAW. *Kharaj* adalah Pajak terhadap tanah atau di Indonesia disebut juga dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan antara *Kharaj* dan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu, *Kharaj* ditentukan berdasar tingkat produktivitas pada tanah bukan berdasarkan pada *Zoning*. Hal ini berarti bahwa, bisa jadi untuk tanah yang berdekatan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur dan sisi lain ditanami oleh kurma, maka mereka harus membayar *Kharaj* yang berbeda.⁴² Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 25-26

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 2005, hlm. 285

⁴² Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 257

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴³

c. *Khums*

Khums, menurut para ulama *Syi'i* bahwa sumber pendapatan apa pun harus dikenakan sebesar 20%, sedangkan menurut ulama *Sunni*, bahwa itu hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Khums* bukanlah hasil dari perang saja, namun juga barang temuan atau barang tambang⁴⁴. Seperti firman Allah SWT, dalam QS. Al-Anfal ayat 1 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”⁴⁵.

d. *Jizyah*

Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh orang-orang Non-Muslim, sebagai pengganti fasilitas sosial dan ekonomi serta layanan kesejahteraan lainnya, dan untuk mendapatkan suatu perlindungan keamanan dari Negara Islam. *Jizyah* sama dengan Pull Tax, karena umat

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.... hlm. 35

⁴⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3*, hlm. 264

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*....., hlm. 141

Non-Muslim tidak mengenal yang namanya Zakat Fitrah. Jumlah yang harus dibayarkan sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. AT-Taubah ayat 29 :

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”⁴⁶

C. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.⁴⁷

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta yang tidak bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya maka status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.⁴⁸

⁴⁶ Ibid, hlm. 152

⁴⁷ Mardiasmo, “Perpajakan Edisi Revisi 2011” (Yogyakarta : ANDI), hlm. 311

⁴⁸ Rochamt Soemitro dan Dewi Kania Kughianti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Revisi (Bandung : PT Refika Aditama, 2004), hlm. 5

Sedangkan menurut Waluyo, Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan yang berarti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yakni bumi dan bangunan, subjek pajak tidak ikut dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.⁴⁹

Menuru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi ataupun bangunan yang dimiliki, dikuasai, ataupun dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kepentingan usaha seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang dikenakan atau dibayarkan terhadap bumi dan bangunan meliputi tanah, perairan pedalaman, konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan tetap pada tanah dan perairan yang dilaksanakan oleh para wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Dasar Hukum

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut :

- a. Untuk lebih memberikan keadilan dalam penanganan pajak, diatur ketentuan mengenai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap wajib pajak.

⁴⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hlm.196

- b. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.

Selanjutnya diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana diberlakukannya pasal 77, 78, 79, 80, 81 82, 83, 84 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui suatu perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.⁵⁰

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis

Pendekatan atau metode dalam penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis dan letaknya berdekatan serta fungsinya sama dan sudah diketahui harga jualnya. Pendekatan atau metode ini disebut juga dengan Pendekatan atau Metode Data Pasar atau Perbandingan Harga.

Penentuan NJOP ini biasanya dilakukan untuk mengetahui besarnya NJOP tanah namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.

- b. Nilai perubahan baru

Pendekatan atau metode penentuan dalam nilai jual suatu objek dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 312

suatu objek tersebut dan saat penilaian dilakukan kemudian dikurangi penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. Pendekatan atau Metode ini disebut juga dengan suatu Pendekatan atau Metode biaya.

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah ataupun bangunan dan paling utama untuk menentukan besarnya NJOP pada bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya.

c. Nilai jual pengganti

Pendekatan atau metode penentuan dalam nilai jual suatu objek pajak berdasarkan pada hasil produksi objek tersebut. Pendekatan atau metode ini disebut juga dengan Pendekatan atau Metode Pendapatan.⁵¹

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan besarnya NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi harus ditentukan dengan hasil bersih pajak tersebut. Pendekatan untuk NJOP ini digunakan untuk galian tambang atau objek perairan.

Peran NJOP sangat penting untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang akan menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayarnya. Penentuan NJOP sendiri didasarkan pada penilaian lahan dan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. NJOP ditentukan berdasar pada harga rata-rata dari transaksi jual beli, maka dalam

⁵¹ Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010) hlm. 137

pelaksanaan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dilapangan dapat saja NJOP lebih tinggi atau juga bisa lebih rendah dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Hal itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena jika NJOP setiap tahun mengalami kenaikan bisa saja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan mengalami suatu peningkatan, dan sebaliknya jika NJOP mengalami suatu penurunan, maka tidak mungkin penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga akan mengalami suatu penurunan.⁵²

4. Subjek dan Objek

a. Subjek Pajak

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan wajib pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atasnya, dan juga memiliki, menguasai dan juga memperoleh manfaat atas bangunan. Seharusnya ada perbedaan mengenai subjek pajak dan juga wajib pajak, karena dapat memudahkan dalam mengetahui secara pasti siapa yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Penjelasan diatas merupakan pengertian mengenai subjek pajak, sedangkan dalam pandangan wajib pajak dapat ditambahkan bahwa subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak yakni wajib pajak.

- 1) Termasuk dalam subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi, atau badan yang secara nyata

⁵² Megawati Aristalia Tawas, "Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kotamobagu", Universitas Sam RATulangi Manado, ISSN 2203-1174, hlm. 875, 877-878

memiliki suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas suatu bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak;

- 2) Subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam No. 1 yang berhak atau memiliki kewajiban dalam membayar pajak menjadi wajib pajak.
- 3) Dalam hal objek yang belum jelas diketahui siapa wajib pajaknya, Dirjen Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam No, 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak dalam menentukan subjek pajak bagi wajib pajak, apabila objek pajak belum jelas siapa wajib pajak yang sebenarnya;
- 4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam No. 3 bisa memberikan keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud;
- 5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak pada No. 4 disetujui, maka Dirjen Pajak dapat membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam No. 3 dengan jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud;
- 6) Bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Dirjen Pajak bisa mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai suatu alasan-alasan yang jelas;
- 7) Apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam No. 4 Dirjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap telah disetujui.

Apabila Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak telah gugur atau batal dengan sendirinya dan berhak untuk mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.⁵³

b. Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.⁵⁴

Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan beberapa faktor berikut, yaitu :

- 1) Letak;
- 2) Peruntukan;
- 3) Pemanfaatan;
- 4) Kondisi Lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor berikut, yaitu :

- 1) Bahan yang digunakan;
- 2) Rekayasa;
- 3) Letak;
- 4) Kondisi Lingkungan dan lain-lain.

⁵³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta : Andi), hlm. 396-397

⁵⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011.....*, hlm.313

Objek pajak yang dikecualikan dan digunakan hanya untuk melayani kepentingan-kepentingan umum dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan pribadi, antara lain :

- 1) Di bidang ibadah seperti masjid, gereja, vihara;
- 2) Di bidang kesehatan seperti rumah sakit;
- 3) Di bidang pendidikan seperti sekolah ataupun pesantren;
- 4) Di bidang kebudayaan nasional seperti museum, candi;
- 5) Digunakan untuk pemakaman umum (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- 6) Hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dimiliki atau dikuasi oleh desa, dan tanah milik negara yang belum dibebani suatu hak;
- 7) Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 8) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang telah ditentukan oleh menteri keuangan.

5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, dalam arti untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.⁵⁵

⁵⁵ Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010) hlm. 135

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak sejenis apapun yang berada di wilayah Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda. Tarif ini mencerminkan wujud kesederhanaan, kemudahan pelaksanaan oleh aparat perpajakan.

6. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai sebuah bidang tanah dan bangunan yang NJOP nya Rp. 20.000.000 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp. 12.000.000, maka besarnya pajak yang terutang adalah :

$$= 0,5\% \times 20\% \times (\text{Rp. } 20.000.000 - \text{Rp. } 12.000.000)$$

$$= \text{Rp. } 8.000.000^{56}$$

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebagai iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana :⁵⁷

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Mengisi formulir pajak dengan data yang lengkap dan jelas;
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. Membayar pajak terutang tepat waktu.

⁵⁶ Mardiasmo, *Perpajakan* Edisi Revisi (Yogyakarta : Andi Offset, 2013), hlm. 338

⁵⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2008), hlm. 32

Jadi dapat disimpulkan, kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana para wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dalam pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dan penerimaan.

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang dilakukan.⁵⁸

Robbins mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan potensi riil daerah.⁵⁹

⁵⁸ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hlm. 4.

⁵⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008)

Menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan mengenai seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan target yang ditentukan. Efektivitas hanya melihat apakah program yang sudah direncanakan bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan hubungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Efektivitas yaitu mengukur suatu hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri.⁶⁰

Efektivitas dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu mengukur seberapa besar hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Efektif atau tidaknya penerimaan PBB yang telah dilakukan di Kota Bandar Lampung bisa dilihat dari seberapa besar hasil yang didapat dan disesuaikan dengan target yang telah ditentukan.

Penulis dapat menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Efektivitas adalah penentuan berhasil atau tidaknya suatu organisasi yang mana bisa dilihat dari hasil yang dicapai dalam program-program yang sudah terlaksana dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya.

⁶⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Revisi, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009), hlm. 132

2. Model-model Efektivitas

Tinjauan literatur mengenai efektivitas menunjukkan bahwa ada rasa ketidakpuasan dengan dua pendekatan organisasi yaitu model tujuan dan juga model sistem. Lebih lanjut lagi, berbagai model yang dikembangkan atas beberapa disiplin ilmu lainnya juga telah banyak dibahas. Berikut adalah model-model dalam efektivitas, sebagai berikut :

a. Model Tujuan

Suatu organisasi memiliki arti, diciptakan dan dirancang secara sengaja untuk mendapatkan atau memperoleh suatu tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, model tujuan merupakan model yang paling banyak digunakan sebagai kriteria efektivitas. Dalam kenyataannya, model ini mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Model tujuan pada dasarnya menyatakan bahwa efektivitas organisasi harus dilihat dan dinilai dari hasil yang sudah dicapai bukan dari prosen yang sudah dilakukan. Karena tidak semua organisasi mempunyai tujuan dengan karakteristik yang sama, maka manajer jika ingin memilih model ini hanya bila hasil akhir yang menjadi tujuan jelas dan kapan harus terealisasi.

b. Model Sumber Daya Sistem

Model sumber daya sistem merupakan pembaruan dari model sistem organisasi. Model ini memiliki pandangan, bahwa organisasi sebagai suatu struktur yang dapat diidentifikasi dan mempunyai ketergantungan antara organisasi dan juga lingkungan disekitarnya. Sukses organisasi dalam satu periode tentu sebagai pencapaian dalam

efektivitas organisasi. Karena, sumber daya bisa beranekaragam jenis dan kompetisi yang berbeda-beda, dan karena ada sesuatu yang dapat dipertukarkan antar sumber daya, penilaian efektivitas harus dilakukan karena tidak atas dasar kriteria. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa model sumber daya sistem menekankan pada akuisisi sumber daya yang dibutuhkan sebagai kriteria penilaian efektivitas. Model ini lebih baik digunakan jika ada hubungan yang jelas antara sumber daya dan kelurahan organisasi.

c. Model Ketidakefektifan

Model ketidakefektifan memusatkan pada faktor-faktor yang menghambat kinerja organisasi, bukan faktor-faktor yang memberikan keberhasilan. Suatu organisasi dikatakan dapat mencapai efektivitas bila bebas dari karakteristik ketidakefektifan. Keunggulan dari model ini adalah dapat membetikan pedoman kepada manajer-manajer bagi kegiatan dan pengembangan. Model ketidakefektifan paling tepat jika kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak disejuti bersama, dan jika ada suatu kebutuhan dalam mengembangkan secara sistematis strategi-strategi pengembangan organisasi.⁶¹

3. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas

Ada empat kelompok yang berpengaruh terhadap suatu efektivitas organisasi, adalah sebagai berikut: Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi, karakteristik lingkungan, yakni termasuk dalam

⁶¹ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm. 107-111

lingkungan interen dan juga lingkungan eksteren, karakteristik karyawan, dan yang terakhir karakteristik praktik manajemen. Dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas, yakni struktur, teknologi, lingkungan eksteren dan interen, keterikatan karyawan dengan organisasi, prestasi kerja karyawan, serta kebijakan manajemen. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing variabel :

a. Teknologi

Teknologi dapat diartikan yaitu perbuatan, pengetahuan, teknik, peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output, barang atau jasa. Dengan teknologi yang sudah ada dan sering dipakai jika tidak dibandingkan dengan teknologi yang baru tidak dapat dikatakan bahwa teknologi yang digunakan itu berpengaruh terhadap efektivitas. Jadi jika ingin mengetahui apakah teknologi yang sudah dipakai memberikan atau berpengaruh terhadap efektivitas maka perlu dibandingkan.

Realita yang sering terjadi di masyarakat jika teknologi tersebut baru dan lebih canggih dari teknologi sebelumnya akan dapat meningkatkan produktivitas. Teknologi dapat memberikan efektivitas atau produktivitas tergantung bagaimana faktor-faktor lainnya, terutama manusia yang menggunakannya, apakah penggunaannya mempunyai skill atau tidak.

b. Teknologi, Struktur, dan Efektivitas

Teknologi selain berpengaruh terhadap efektivitas, juga bisa berpengaruh terhadap struktur. Struktur yaitu pembagian pekerjaan, pengelompokan, spesialisasi, koordinasi, dan sebagainya yang berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaan. Struktur juga berpengaruh terhadap efektivitas. Perbedaan teknologi juga mempunyai pengaruh terhadap efektivitas, lain teknologinya akan lain juga efektivitasnya, demikian juga dengan perbedaan struktur akan berpengaruh terhadap efektivitas.

Steers, penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan antara teknologi, struktur dan juga efektivitas masih kurang jelas karena mengabaikan faktor sosial dan individu. Karena itu, jika ingin meneliti berbagai faktor yang berkaitan dengan efektivitas, maka faktor perilaku harus dipertimbangkan. Bahwa efektivitas dapat dipandang sebagai fungsi dari kemampuan suatu organisasi yang dengan sukses memadukan teknologi, struktur, dan karakteristik pribadi dengan faktor-faktor sosial menjadi kesatuan yang selaras dan berorientasi tujuan.

c. Lingkungan, Struktur, dan Efektivitas

Penelitian mengenai pengaruh lingkungan terhadap efektivitas organisasi yang dilakukan oleh Burn dan Stalker, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh lingkungan timbullah dua jenis sistem manajemen, yaitu sistem organik dan mekanistik. Mereka juga berpendapatn bahwa desain organisasi yang paling efektif ditentukan oleh faktor ekstern. Manajemen harus memahami dengan baik kondisi lingkungan, dan menyesuaikan struktur dan praktik organisasi untuk memenuhi dan memanfaatkan kondisi lingkungan.

Mengenai hubungan antara lingkungan dan efektivitas, penelitian yang dilakukan oleh Osborn dan Hunt dapat disimpulkan bahwa,

efisiensi tergantung pada kemampuan organisasi untuk berinteraksi dan berhubungan dengan lingkungannya secara erat yang saling menguntungkan.

d. Motivasi dan Imbalan

Motivasi dapat diartikan sebagai proses yang membangkitkan, mengarahkan dan mempertahankan perilaku selama jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Porter dan Lawler, ada dua faktor yang mendukung motivasi untuk berbuat, yaitu individu dan organisasi. Dalam faktor individu yang paling berpengaruh yaitu kebutuhan, sedangkan dari faktor organisasi yang paling berpengaruh adalah faktor imbalan. Namun efektif atau tidaknya tergantung pada faktor-faktor lainnya, seperti struktur, teknologi, gaya kepemimpinan, persepsi peran, dan budaya organisasi.⁶²

4. Indikator Efektivitas

Menurut Mardiasmo, indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.⁶³

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencapai efektivitas baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang bisa menjadi ukuran efektivitas organisasi. Berikut adalah indikator dalam efektivitas :

⁶² *Ibid*, hlm. 90-92

⁶³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Revisi., hlm. 134.

a. Produksi

Produksi dalam barang atau jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang maupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya.

Produksi dalam pajak disini berarti, pemerintah dapat memberikan hasil dari pemungutan pajak yang telah dilakukan dengan melakukan pembangunan-pembangunan dalam infrasturktur atau meningkatkan suatu pelayanan bagi masyarakat.

b. Efesiensi

Efesiensi bisa diartikan dengan perbandingan antara pengeluaran dan juga pendapatan. Agar suatu organisasi dapat survive perlu memperhatikan efesiensi. Ukuran dalam sebuah efesiensi melibatkan peningkatan laba, modal, biaya per unit, penyusutan, depresiasi, dan sebagainya.

Efesiensi dalam pajak, bisa diartikan seperti apa pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak agar bisa digunakan secara efisien dalam melakukan pengeluaran yang bijak dan diiringi dengan pendapatan pajak yang terus meningkat dan sesuai target.

c. Adaptasi

Adaptasi bisa diartikan sampai sejauh mana organisasi mampu menerpakan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, dan apakah bisa ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Dengan adanya suatu perubahan maka diharapkan organisasi bisa berkembang.

d. Perkembangan

Perkembangan dalam suatu organisasi dapat diartikan, bagaimana organisasi tersebut bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik. Dari pengembangan kemampuan tersebut, bisa membuat organisasinya untuk berkembang untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.⁶⁴

Menurut Mahmudi, tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formulasi efektivitas. Formula untuk mencari efektivitas mengenai perpajakan adalah perbandingan antara realiasi pajak dengan target pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan pada indikator dibawah ini⁶⁵.

Tabel 2.1
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri, No. 690.900.327 Tahun 1996

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus

⁶⁴ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, hlm. 106-107

⁶⁵ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2016), hlm.

pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.⁶⁶

E. Kontribusi

1. Pengertian Kontribusi Pajak

Menurut Mahmudi, kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui kontribusi dapat dilakukan dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.⁶⁷

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan pajak, yang dihasilkan melalui kegiatan pelaksanaan proses yang berdasarkan system dan prosedur dalam pemungutan pajak yang sudah berlaku guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁶⁸

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kontribusi adalah cara untuk mengukur atau mengetahui berapa besarnya sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

⁶⁶ Dedi Nordiawan dan Ayuningtyas Hetianti, *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2 (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm. 161

⁶⁷ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm. 12

⁶⁸ Julaiha, "Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda", *eJournal Administrasi Negara* Volume 5, (Nomor 2) 2017.

2. Kriteria Kontribusi

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan rumus berikut :⁶⁹

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur berapa besar kontribusi maka dapat digunakan indikator dibawah ini :

Tabel 2.2
Interpretasi Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : *Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991*

Semakin besar persentase kontribusi yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka semakin baik pula sumbangan yang diberikan dan menandakan itu sangat berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Sebaliknya, jika persentase kontribusi semakin kecil maka semakin kecil pula sumbangan yang diberikan terhadap PAD yang menandakan bahwa pendapatan PBB tidak begitu baik.

⁶⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*,(Jakarta : Salemba Empat, 2004) hlm. 152

F. Pajak Dalam Pandangan Ekonomi Islam

1. Pengertian Pajak Dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Adh-dharibah* yang berasal dari kata *dharba*, *yadhribu*, *dharban* dimana artinya adalah mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. *Dharba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*) sedangkan bentuk kata bendanya (*Ism*) adalah *dharibah*, yang berarti beban. Disebut beban karena merupakan suatu kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.⁷⁰

Sedangkan menurut bahasa, Abdul Qadim Zallun berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap umat Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran yang memang diwajibkan kepada mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.⁷¹

Pengertian Pajak menurut Yusuf Qardhawi, adalah kewajiban yang sudah ditetapkan kepada para wajib pajak, yang harus dibayarkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mengharapkan prestasi kembali dari Negara, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.⁷²

⁷⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Perss, 2011), hlm. 28

⁷¹ Andul Qadim Zallun, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khalifah, Dar Al-Ilmi Lialayin*, Ce. II, 1408 H/1988 M, Terjemah Oleh Ahmad S. dkk, *Sistem Keuangan di Negara Syariah*, (Bogor : Pustaka Thariq Izzah, 2002), hlm. 138

⁷² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm. 72

2. Landasan Teori Pajak Menurut Syariat

Sumber-sumber pendapatan Baitul Mal dalam Khilafah Islam yang telah ditetapkan syariat sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu, sebetulnya tidak perlu lagi ada kewajiban pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syariat Islam sudah menetapkan pembiayaan untuk berbagai keperluan dan bidang, yang dibebankan kepada Baitul Mal.

Memang pada harta tak ada kewajiban selain zakat. Namun, apabila zakat telah diselesaikan, kemudian sesudah itu ternyata datang kebutuhan mendesak, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut. Apabila harta Baitul Mal kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam hendaklah membebankan biaya itu kepada mereka yang kaya sekira dapat mencukupi keperluan tersebut, sehingga Baitul Mal berisi kembali.⁷³

Menurut Qardhawi, Asas Teori Wajib Zakat (dan pajak) adalah sebagai berikut :

a. Teori Beban Umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebankan kepada hambanya yang dikehendaknya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajiban dan tanda syukur atas nikmat-Nya dan untuk menguji siapa yang paling baik amalannya diantara mereka dan untuk menguji apa yang ada dihati mereka, agar Allah membersihkannya, juga agar Allah mengetahui siapa

⁷³ *Ibid*, hlm 172

yang taat kepada Rasul-Nya, dan siapa yang membangkang, sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari yang baik, mana yang jahat mana yang baik, kemudian Allah membalas perbuatan mereka, sedang mereka tidak dianiaya.

Teori pertama ini, pendekatannya adalah dari sisi manusia sebagai makhluk, yang dapat diperintah oleh sang Khaliq, diuji, diberi tanggung jawab, dan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang diinginkan sang Khaliq.

b. Teori Pembelaan Antara Pribadi dan Masyarakat

Diantara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷⁴

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 2005, hlm. 65

c. Teori Persaudaraan

Persaudaraan yang dibawa oleh Islam ada dua macam atau dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang dasarnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang dasarnya sama-sama dalam warna kulit yang berbeda-beda, dan berbeda-beda pula tingkat dan derajatnya, Allah memanggil mereka, 'Hak anak cucu Adam', sebagaimana memanggilnya 'Hai semua manusia'.

Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti punya tuntutan-tuntutan. Diantara tuntutan-tuntutannya adalah janganlah manusia mau hidup senang sendiri, tidak mempedulikan saudaranya sesama manusia.⁷⁵

3. Ulama yang Berpendapat Bahwa Pajak Itu Boleh

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi, telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dipungut dan ada juga yang berpendapat bahwa pajak tidak boleh dipungut. Sejumlah fuqaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, yaitu :

a. Abu Yusuf, dalam Kitab *al-Kharaj*, menyebutkan bahwa :

Semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan untuk melebihi kemampuan rakyat saat membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 175

- b. Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*

Sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan member pengecualian kepada siapa pun karena kedudukan di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuannya.

- c. Hassan al-Banna, dalam bukunya *Majmuatur-Rasa'il*, mengatakan :

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.

4. Karakteristik Pajak Dalam Ekonomi Islam

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut hukum ekonomi Islam, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional yang selama ini sudah diterapkan dalam perpajakan di Indonesia, adalah sebagai berikut :

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer dan tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Disaat baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut, sekalipun tidak adalagi mustahik yang membutuhkan. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya dipungut (abadi),

- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan memiliki batas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama,
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil oleh kaum muslim, tidak untuk kaum non-muslim. Sedangkan menurut teori pajak konvensional pemungutan pajak tidak membedakan agama, dengan alasan tidak boleh adanya tindakan diskriminasi dalam pemungutannya,
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari kaum yang tidak mampu. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, contohnya PBB,
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak bisa lebih dari itu.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus jika sudah diperlukan kembali. Tetapi, menurut teori pajak konvensional pajak tidak akan dihapus, karena itu adalah sumber dari penerimaan⁷⁶.

⁷⁶ Nur Kholis, "*Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*", hlm. 19-20

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.W. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Ed. 2*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011).
- Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang : UB Press, September 2017).
- Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010).
- Eko, Nugroho. 2002, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Perss, 2011),
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008)
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012).
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : bpfe, 2009).
- Karim, Adiwarman. 2010. *Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2016)
- , *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta : Erlangga, 2010),
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Revisi, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009
- , *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2008),
- , *“Perpajakan Edisi Revisi 2011”* (Yogyakarta : ANDI OFFSET).
- , *Perpajakan* Edisi Revisi (Yogyakarta : Andi Offset, 2013).
- , *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta : Andi).
- Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hetianti, *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2 (Jakarta : Salemba Empat, 2016).
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Ed.1), Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwono. Herry, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, (Bandung : CV Alfabeta, Cetakan ke-23, 2016).

Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group)

Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Kughianti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Revisi (Bandung : PT Refika Aditama, 2004).

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008).

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).

Jurnal:

Ferian Dana Pradita, dkk, “Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB_P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”, PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Julaiha, “Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda”, eJournal Administrasi Negara Volume 5, (Nomor 2), 2017.

Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst Putu Wirawati, “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali”, (E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana, S.3, 2013:574-585).

Lintong, Felia, dkk. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Manado”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (4), 2018.

Megawati Aristalia Tawas, “Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kotamobagu”, Universitas Sam Ratulangi Manado, ISSN 2203-1174

Utairahman, Nur Riza dkk. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tumohon”, Vol. 16 No. 02 (2016)

Wardani, Raudhatun dan Wida Fadhila. “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 2, No. 3, (2017)

Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan. *“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember”*, Jurnal STIE Semarang Vol. 9 No. 1 (Februari 2017)

Yoduke, Ryfal dan Sri Ayem. *“Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014”*, Jurnal Akuntansi, Volume 3 No. 2 (Desember 2015).

Internet :

<http://www.lampost.co/berita-realisasi-pbb-kota-baru-54-persen.html>, (1 Agustus 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<http://www.lampost.co/berita-wow-tunnggakan-pbb-kota-bandar-lampung-mencapai-rp-9-4-miliar.html>, (1 Agustus 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

